

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, Putra. 2013. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Hubungan Antara Kinerja Dengan Nilai Perusahaan. *E-Journal Universitas Udayana*. Vol. 5, No.3, 2013.
- APBDesa Ngarum Tahun 2020
- Ayun Shafira Qurrata. 2020. Analisis pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran pendapatan Dan belanja desa (apbdes) desa nglambangan Kecamatan wungu kabupaten madiun
- Bely,R.B Dj. *et al*, 2015, Petunjuk pelaksanaan Bimbingan dan konsultasi Pengelolaan keuangan Desa. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. BPKP.
- Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra Dan Maulidah Rahmawati. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat.
- Evans, J., dan J. Patton. 1987. Signalling and Monitoring in Public Sector Accounting. *Journal of Accounting Research* 25, pp. 130–158. <http://www.jstor.org/>
- Fadzil, Faudziah Hanim Dan Nyoto (2011) “Fiscal Decentralitation After Implementation Of Local Government Autonomy In Indonesia” *World Review Of Business Research Vol 1 No 2 PP 51 – 70*.
- Fajri, Rahmi. *et al*, 2015 Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolahan Alokasi Dana Desa (ADD) *Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 3, No. 7, Hal. 1099-1104*
- Halim dan yam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko, T. Hani 1996, *Manajemen*, Edisi Kedua, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Haryanto, Sahnuddin, Dan Arifuddin, 2007. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama: Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hanifah, Suci Indah. 2015. Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 4 No. 8
- Hasniati, 2016“Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik* Volume 2, Nomor 1, Juni 2016 pISSN: 2460-6162 | eISSN: 2527-6476
- Halim dan yam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Salemba Empat.
- <http://theorykeuangaeraah.blogspot.com/2015/12/akuntabilitas.html?m=1>
- <https://sid.kemendes.go.id/home/dd/3521092007>

<https://sipede.ppmmd.kemendesa.go.id/apbdes/viewkec/352409/2020>

Iksan. 2018. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kantor Desa Sigimpu Kabupaten Sigi

Instruksi persiden No. 7 tahun 1999

Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa 2015

Kementerian Keuangan 2016. Kebijakan Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017. Disampaikan Pada Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Mengenai Tata Cara Perhitungan, Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa TA 2017. Redtop Hotel And Convention Center. 21-24 November 2016.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, 2019

Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan RI 2000. Akuntabilitas Dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), LAN BPKP RI, Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan RI 2003. Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara dan BPKP, Jakarta.

Mardiasmo. 2002, Otonomi Daerah Dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta.

_____. 2009, Akuntansi Sektor Publik, Andi, Yogyakarta.

Mardiana. 2017. Analisis Anggaran Dan Realisasi Dana Desa Pada Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Jurnal Riset Terapan Akuntansi, Vol. 1 No. 1 Januari 2017

Media keuangan volume XIII/ No. 125 / Februari 2018 “transparansi informasi kebijakan fiscal”.

Moe, T.M. (1984) The New Economics Of Organization. American Journal Of Political Science, 28, 737-777. [Http://Dx.Doi.Org/10.2307/2110997](http://Dx.Doi.Org/10.2307/2110997)

_____. 2009, Akuntansi Sektor Publik, Andi, Yogyakarta.

Moeljarto, Tjokroaminoto. 1995. Politik Pembangunan Sebuah Analisis, Konsep Arah dan Strategi. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Moleong, Lexy J., 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.

PP Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014

PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal Dan Transmigrasi;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
APBN;

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Putra, Deki. 2013. *“Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang)”*. Skripsi.w

R.A. Supriyono, 2001, *“Akuntansi Manajemen/(Konsep Dasar Akuntansi Manajemen Dan Proses Perencanaan)”*, Yogyakarta: BEFE.

Rasul, Syahrudin, 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran Dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI

Saladien, 2006 *Rancangan Penelitian Kualitatif Modul Metodologi Penelitian Kualitatif, Disampaikan Pada Pelatihan Metodologi Penelitian Kualitatif Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Jurnal Penelitian Universitas Brawijaya, 6-7 Desember*.

Sopannah, wahyudi. 2010. *“Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Jurnal. Universitas Widya Gama Malang*.

RPJMDesa Ngarum

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
_____. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
_____. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sugianto, at all, 2007 *Akuntansi Pemerintahan dan Organisasi Non Laba*, PPAK Universitas Brawijaya Malang

Sulistoni. 2003. *Fiqh Korupsi: Amanah Vs Kekuasaan*. Somasi. Nusa Tenggara Barat.

Sululing Siswardi. 2017 . Pelaporan Keuangan Alokasi Dana Desa Sebagai Salah Satu Akuntabilitas Keuangan Desa . *Jurnal Ekonomi/Volume XXII, No. 02, Juli 2017: 314-332*

Supriatna, Tjahya. 2001. Akuntabilitas Publik. Jakarta : Bumi Aksara.

Tahir muh, 2019. *Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto 1*

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU Nomor 6 Tahun 2014

UU Nomor 6 Tahun 2014 BAB 1 Pasal 1 ayat 1